

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Esensi dari sebuah kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis kemudian melihat kembali tujuan dan arah implementasi program Guru Garis Depan pada pelaksanaannya di Kabupaten Bandung Barat dan menarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program Guru Garis Depan ini dapat dikatakan berhasil. Indikator keberhasilan yang secara umum terlihat adalah bahwa proses rekrutmen guru-guru pada program ini telah dilaksanakan dengan cukup transparan dan profesional sehingga menghasilkan guru-guru yang memang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan kualifikasi yang profesional sesuai dengan bidang pengajaran yang diampu. Selain itu, proses penempatan guru-guru program ini yang juga telah sesuai dengan tujuan program yaitu meningkatkan kuantitas pemenuhan kebutuhan guru berstatus PNS sesuai dengan mata pelajaran dan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang juga sesuai dan sekolah tersebut benar-benar tercatat sebagai sekolah yang mengalami kekurangan guru profesional berstatus PNS serta berada pada lokasi yang masuk ke dalam kategori sulit, terpencil, dan mengalami keterbatasan infrastruktur.

Dalam ruang lingkup pelaksanaan program di Kabupaten Bandung Barat, keberhasilan program GGD ini juga dapat didasarkan pada beberapa indikator, yaitu: penerimaan sosial, teknis pelaksanaan, dukungan anggaran, dan dukungan politik. Secara sosial, pelaksanaan program GGD di Kabupaten Bandung Barat pada awalnya mengalami banyak kesalahpahaman yang diakibatkan oleh kurang maksimalnya transmisi komunikasi di lingkup pemerintah daerah. Munculnya potensi permasalahan penerimaan sosial akibat adanya perbedaan budaya dan bahasa juga menjadi titik lemah utama pada masa awal-awal implementasi program ini, kemudian disusul dengan adanya anggapan bahwa keberadaan guru-guru melalui program GGD ini akan menutup kesempatan putra-putri daerah untuk menjadi guru PNS dan guru-guru honorer yang merasa terancam akan kehilangan pekerjaan. Namun secara perlahan kesalahpahaman dan tingkat resistensi dari

**Hery Azhar Djafar, 2018**

*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

beberapa pihak terhadap keterlaksanaan program GGD semakin berkurang. Secara teknis, pelaksanaan program ini terdiri atas dua kegiatan utama yaitu perekrutan dan penempatan atau distribusi, kemudian ditambahkan dengan kegiatan pembekalan kepada guru-guru yang telah lulus seleksi. Proses perekrutan dan penempatan berjalan dengan baik, dan cukup transparan meski ada sedikit kekurangan karena terjadinya perubahan kebijakan kewenangan pemerintahan daerah akibat penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keberhasilan program ini juga tidak lepas dari dukungan penganggaran pemerintah yang cukup besar untuk melaksanakan GGD dan untuk menyediakan dana gaji, tunjangan profesi guru, serta tunjangan daerah khusus. Kebijakan penganggaran ini juga ditopang oleh kebijakan pemerintah lainnya yang sedikit melonggarkan persyaratan pemenuhan jam kerja guru. Pelaksanaan program GGD secara nasional juga mendapatkan dukungan politik yang besar dari pihak eksekutif dan legislatif di tingkat pusat, meskipun sebaliknya, pada beberapa pemerintah daerah kemudian menarik diri dari keterlibatan program ini karena mendapatkan desakan dari beberapa elemen masyarakat di daerah mereka. Namun dalam lingkup pelaksanaan di Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut tidak terjadi.

Kemudian bila melihat proses implementasi berdasarkan kategori dari model George C. Edward III maka pengelolaan dari peran empat faktor utama implementasi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), maka masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dalam pengelolaannya. Pertama, beberapa kekurangan yang terjadi terutama dari sisi faktor komunikasi dimana proses penyampaian informasi (*transmission*) yang dilakukan masih belum maksimal, hal ini terbukti dari hasil jawaban wawancara para kepala sekolah yang tidak mengetahui sama sekali dengan adanya program ini. Ketidak tersampainya informasi tersebut menyebabkan mereka merasa terkejut ketika secara tiba-tiba menerima penugasan guru di sekolah masing-masing. Ketidaktahuan akan program inipun mengakibatkan kepala sekolah tidak mampu secara maksimal menjelaskan kepada guru-guru lainnya terutama pada guru-guru honorer yang mempertanyakan akan program GGD tersebut. Berikutnya, tingkat kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) informasi juga menjadi sorotan oleh beberapa narasumber. Pelaksana

**Hery Azhar Djafar, 2018**

*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kebijakan tidak melaksanakan pemberian kejelasan informasi secara maksimal dan jelas serta konsisten terutama pada saat terjadinya penundaan pengumuman kelulusan peserta seleksi pengadaan guru pada program GGD, dimana penundaan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan informasi yang terjadi akhirnya mengakibatkan banyaknya berita-berita spekulasi yang beredar luas di masyarakat sehingga menimbulkan sedikit keresahan bagi peserta seleksi.

Kedua, dalam unsur faktor sumber daya, terbatasnya sumber daya manusia (dalam hal ini jumlah pendidik) yang dapat mengikuti seleksi membuat proses pengadaan guru pada program GGD menjadi kurang maksimal. Kuota sebanyak 7.000 formasi pendidik kurang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terbatasnya sumber daya fasilitas pembelajaran juga kemudian sedikit banyak membatasi proses belajar mengajar yang berkualitas yang diberikan oleh guru-guru pada program GGD.

Ketiga, pada unsur faktor disposisi, dukungan pemerintah dalam menyukseskan program ini sangat terlihat pada tingkat komitmen yang tinggi dalam proses perencanaan program yang telah disesuaikan dengan program – program yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga kontinuitas program pengembangan dan pemerataan pendidikan pada daerah-daerah yang termasuk 3T dan terpencil terus berlangsung. Tingkat komitmen pemerintah juga sangat terlihat pada proses pengadaan atau perekrutan tenaga-tenaga pengajar dalam program ini. Pemerintah melalui BKN memberikan kemudahan dalam proses pemberkasan guru-guru pada proses akhir penerimaan mereka sebagai calon pegawai negeri sipil. Dengan komitmen yang sama dari beberapa instansi terkait, proses administrasi berkas hingga pemberian NIP dapat terlaksana dengan baik meski ada beberapa hambatan. Namun di sisi lain, komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru-guru bukan PNS atau guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri di sekolah-sekolah pada lokasi yang terpencil dipertanyakan. Hal tersebut terjadi karena program ini dianggap sebagai program yang tidak memihak terhadap keinginan atau tuntutan dari banyak guru-guru honorer yang juga menginginkan untuk diangkat menjadi guru PNS.

**Hery Azhar Djafar, 2018**

*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keempat, pada unsur faktor struktur birokrasi, kelemahan terutama terdapat pada kurangnya prosedur-prosedur standar (SOP) yang dibuat terkait dengan implementasi program GGD. Di tingkat pemerintah pusat, penelitian ini hanya menemukan satu prosedur yang disusun untuk kebutuhan pelaksanaan program GGD yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan pada tingkat eselon II pemerintahan (Kemendikbud). Pada tingkatan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini tidak menemukan adanya prosedur standar yang dibuat dalam rangka menyikapi proses penerimaan dan penempatan guru GGD di Kabupaten Bandung Barat sehingga akhirnya menjadikan pelaksanaan program ini menjadi kurang maksimal.

Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi faktor pendukung utama yang harus ditingkatkan dalam proses mencapai tujuan dari program ini secara maksimal. Sedangkan, faktor infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, serta fasilitas perumahan bagi tenaga pengajar menjadi faktor penghambat utama dari pelaksanaan program GGD.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan di daerah-daerah 3T atau terpencil melalui program Guru Garis Depan di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata dalam hal kualitas pada daerah-daerah terpencil telah terlaksana meskipun secara kuantitas masih terbilang kecil. Sebagaimana diketahui berdasarkan data kebutuhan guru, Kabupaten Bandung Barat masih mengalami kekurangan guru PNS pada jenjang SD dan SMP yang cukup banyak, terutama pada daerah-daerah yang berada pada lokasi yang sulit (sehingga lebih banyak diisi oleh guru-guru yang berstatus honorer dan mengajar pada lebih dari satu sekolah) dan mengalami kekurangan infrastruktur pembelajaran.

Meski demikian, penulis mencatat beberapa implikasi positif dari program GGD ini berdasarkan dari temuan-temuan data dan informasi di lapangan. Proses perekrutan guru berdasarkan kompetensi dan kualifikasi profesional dalam jangka

**Hery Azhar Djafar, 2018**

*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

panjang akan dapat menghasilkan proses pembelajaran yang semakin berkualitas di daerah-daerah terpencil pada Kabupaten Bandung Barat. Guru-guru GGD yang telah ditempatkan juga memberikan perkembangan terhadap peserta didik dengan memberikan metode pembelajaran yang inovatif baik melalui intra maupun ekstrakurikuler. Kemudian, keberadaan guru-guru program ini juga dapat menjadi tumpuan besar bagi para *stakeholder* pendidikan di Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan contoh, tauladan, dan dapat dijadikan motivasi serta inspirasi bagi guru-guru lainnya yang berada di sekolah tempat mereka bertugas maupun sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan memberikan berbagai wawasan baru kepada seluruh masyarakat pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

Harapan terbesar dari pelaksanaan program ini adalah, guru-guru GGD ini kemudian mampu untuk memberikan kontribusi yang jauh melampaui pagar sekolah dengan menjadi agen perubahan di dalam kehidupan masyarakat, terjun langsung untuk mengembangkan program-program sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan dan beberapa implikasi program yang diharapkan, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program Guru Garis Depan pada tahap selanjutnya.

Pertama, untuk memaksimalkan peran dari faktor komunikasi, pemerintah pusat sebaiknya meningkatkan peranannya dalam menyosialisasikan gagasan dan tujuan dari pelaksanaan program GGD melalui penulisan artikel atau berita pada berbagai media baik cetak ataupun media dalam jaringan sehingga dapat meningkatkan *public awareness* dan mendorong masyarakat untuk memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap pelaksanaan program tersebut. Kemudian, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program GGD. Sementara dalam lingkup pemerintahan daerah, pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar meningkatkan level koordinasi terhadap kepala Hery Azhar Djafar, 2018

*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

sekolah dan pengawas untuk memberikan sosialisasi dan dukungan terhadap kebijakan yang telah diambil.

Dalam hal sumber daya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari guru-guru GGD melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sehingga dapat memacu kinerja pengajaran dan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Kemudian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat agar meningkatkan koordinasi dalam upaya menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi guru-guru yang telah ditempatkan pada lokasi-lokasi yang sulit dan terpencil. Koordinasi ini juga dibutuhkan untuk memetakan dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang pada sekolah-sekolah sasaran program GGD. Pemerintah daerah juga perlu untuk mempersiapkan kompetensi dan kualifikasi dari sumber daya pendidik lokal (putra putri daerah) agar dapat mengikuti proses seleksi sebagai guru dalam program GGD pada proses pengadaan di tahap berikutnya.

Terakhir, dalam hal disposisi, pemerintah pusat perlu menyusun kebijakan baru mengenai perekrutan untuk mengakomodir keinginan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat agar putra-putri daerah setempat diberikan prioritas menjadi guru dalam program GGD. Hal ini sebaiknya dilakukan terutama untuk menekan tingkat kecemburuan sosial bagi calon-calon guru dan guru-guru honorer lokal yang juga masih berharap untuk diangkat menjadi guru PNS. Peningkatan kuota rekrutmen bagi putra-putri daerah juga dianggap dapat meminimalisir implikasi negatif dari perbedaan budaya dan bahasa. Pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan untuk menyusun kebijakan baru untuk menempatkan dua orang guru program GGD dalam satu sekolah terpencil agar dapat saling bahu-membahu membangun sistem pembelajaran yang efektif dan berkolaborasi dalam melaksanakan program-program yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah tersebut.

**Hery Azhar Djafar, 2018**

*ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM GURU GARIS DEPAN (GGD) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu